

## ABSTRAK

Observasi ini bertujuan untuk mengamati dan menilai efektivitas pengelolaan anggaran di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dengan fokus utama pada kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan objek observasi berupa laporan keuangan instansi. Data yang dianalisis merupakan data sekunder, yaitu dokumen anggaran dan realisasi anggaran tahun 2021 hingga 2024 yang diperoleh melalui dokumentasi internal. Selain itu, wawancara dengan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran juga dilakukan untuk memperdalam analisis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas serta hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tergolong efektif, dengan tingkat efektivitas yang secara konsisten berada di atas 97% setiap tahunnya. Meskipun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjukkan efisiensi anggaran, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan bukti dukung, kekurangan anggaran saat pelaksanaan, kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, serta kendala perpajakan akibat transaksi dengan penyedia non-PKP. Untuk mengatasinya, dilakukan koordinasi lintas bidang, penggunaan metode Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai pembayaran awal, serta pengajuan revisi anggaran ke Kantor Wilayah. Pemotongan PPh tetap dilakukan meskipun PPN tidak dapat ditarik. Langkah-langkah ini bertujuan menjaga efektivitas dan kelancaran pelaksanaan anggaran.

**Kata kunci: Anggaran, Efektivitas, Pengelolaan Anggaran, dan Realisasi Anggaran.**

## ABSTRACT

This observation aimed to observe and assess the effectiveness of budget management at the Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, with a primary focus on the alignment between budget planning and realization. A descriptive quantitative approach was used, with the agency's financial reports as the object of observation. The data analyzed were secondary, namely budget documents and budget realization for 2021 to 2024, obtained through internal documentation. Furthermore, interviews with employees directly involved in budget management were conducted to deepen the analysis of factors influencing effectiveness and obstacles encountered during implementation.

Observations indicate that budget management at the Kejaksaan Tinggi Jawa Barat is considered effective, with an effectiveness rate consistently above 97% annually. Although the Kejaksaan Tinggi Jawa Barat has demonstrated budget efficiency, obstacles remain, including limited supporting evidence, budget shortfalls during implementation, efficiency policies from the central government, and tax constraints resulting from transactions with non-PKP providers. To address these issues, cross-sectoral coordination, the use of the Government Credit Card (KKP) method for initial payments, and budget revisions are submitted to the Regional Office. Income Tax deductions are still made even though VAT cannot be collected. These steps aim to maintain the effectiveness and smoothness of budget implementation.

**Keywords: Budget, Effectiveness, Budget Management, and Budget Realization.**